RENCANA KERJA

KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN NGORO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir RENJA) Kecamatan Ngoro Tahun Anggaran 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir RENJA) Kecamatan Ngoro Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2024

CAMAT NGORO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KEC. NGORO

SATRIYO WAHYU UTOMO,S.IP,M.Si

Pembina

NIP. 198806182007011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
BAB I	**.....**	**1**
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	5
1.4 Sistematika penulisan	.....	5
BAB II	**.....**	**10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngoro	.....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	42
BAB III	**.....**	**44**
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	44
BAB IV	**.....**	**51**
BAB V	**.....**	**58**
5.1 Catatan Penting	.....	58
5.2 Kaidah-Kaidah	.....	58
5.3 Rencana Tindak Lanjut	.....	59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Awal Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Ngoro yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Ngoro adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2022 – 2026.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Ngoro memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja perubahan yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip

:

1. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

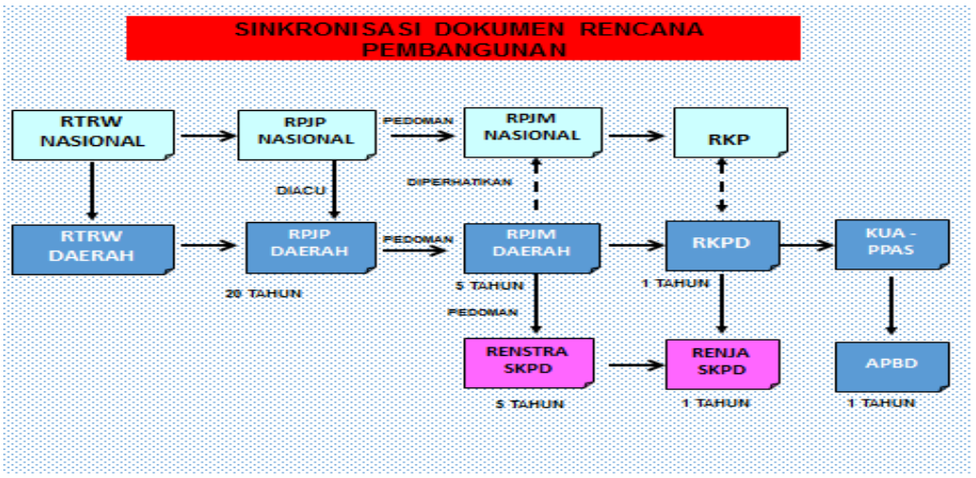

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.aten Mojokerto;
32. SK tim penyusunan renstra Kec. Ngoro Nomor 188/45/416-305/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2021-2026
33. Sk Tim Penyusunan Renja 2025 Kec Ngoro

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil.
4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan awal Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kec. Ngoro serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah**.**

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan *SDG's (Suistanable Development Goals*)
4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN DASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

  Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, pagu dana indikatif dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA PD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Ranwal Renja dan Rencana Tindaklanjut Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah." Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Ngoro pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran pada Kecamatan Ngoro Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.972.904.000**	**2.666.825.228**	**89,70**	**306.078.772**
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.851.200**	**12.851.200**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.851.200	4.851.200	100	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.443.164.000**	**2.167.740.317**	**88,73**	**275.423.683**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.164.000	2.167.740.317	88,73	275.423.683
C.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.103.900**	**10.603.900**	**87,61**	**1.500.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.103.900	10.603.900	87,61	1.500.000
D.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**283.613.200**	**268.484.850**	**97,00**	**5,985,275**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.300	9.987.450	99,90	9.850
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.216.000	104.600.000	88,48	13.616.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.996.000	34.993.500	99,99	2.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	100	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	3.300.000	100	0
	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	40.000.000	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	45.000.000	100	0
E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000**	**9.950.000**	**99,50**	**50.000**
	Pengadaan Mebel	10.000.000	9.950.000	99,50	50.000
F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.346.900**	**95.551.511**	**85,32**	**14.795.389**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.398.900	35.603.591	70,64	14.795.309
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.948.000	59.947.920	100	80
G.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.928.700**	**112.247.350**	**99,44**	**681.350**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.992.700	39.349.000	98,39	643.700
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.996.000	57.958.350	99,94	37.650
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.940.000	14.940.000	100	0
II.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**32.300.000**	**32.300.000**	**100**	**0**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
A.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**32.300.000**	**32.300.000**	**100**	**0**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	32.300.000	32.300.000	100	0
III.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**251.860.000**	**250.627.500**	**99,20**	**1.232.500**
A.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**251.860.000**	**250.627.500**	**99,20**	**1.232.500**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.670.000	36.470.000	99,45	200.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.190.000	29.490.000	97,68	700.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.400.000	45.325.000	99,83	75.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	139.600.000	139.342.500	99,82	257.500
JUMLAH		**3.257.064.000**	**2.949.752.728**	**90,56**	**307.311.272**

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2023)

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapaian Kinerja secara umum terlaksana dengan baik 90,56 %, Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.257.064.000 terealisasi sebesar Rp. 9.949.752.728 sisa anggaran Rp. 307.311.272

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran gaji dan TPP sebesar Rp. 275.423.683 karena adanya ASN yang Purna Tugas,Mutasi dan meninggal di Kecamatan Ngoro. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 30.680.009 dan pembulatan dll sebesar Rp 1.207.580

Kegiatan reviu evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu

adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C. 29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Ngoro

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah sd 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5=n-3	6=n-2	7=n-2	8=(7/6)	9=n-1	10=(5+7+9) (n-1)	11=(10/4) (n-1)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80,19	78,69	98,13%			
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target								

7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen		
7.01.01.02.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	20 dokumen	100%	20 dokumen		
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai			85%	90,56%	66.67%	100%		
7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan	17 Orang/bulan	100%	28 dokumen		
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							80		
7.01.01.02.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%	-		
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						100%		
7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga			1 paket	1 paket	100%	1 paket		

		n bangunan kantor yang disediakan								
7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	100%	1 paket		
7.01.01.02.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	2 paket	100%	2 paket		
7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
7.01.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 paket	12 paket	100%	1 paket		
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							100%		
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan		
7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**						100%		
7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	3 unit	100%	3 unit		

7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%		100%		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai Standart Pelayanan								
7.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standart Pelayanan								
7.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.02.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen		
7.01.06.02.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
7.01.06.02.01.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2023)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 3 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Ngoro

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2024)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan

suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro

Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM			82	83	84	85	87,24	89,99	90	91	
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			61	63	64	65	60,47	-	61	62	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,73	80,53	81,33	82,13	80,19	78,69	79	79,50	
	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target			100%	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%	100%	

	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah			90%	92%	94%	96%	93,73%	90,56	92%	93%	
	IP ASN Perangkat Daerah			81	83	86	88	71,37	Na	72	73	
	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan			90%	92%	94%	96%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3 kendaraan	4 kendaraan	5 Kendaraan	6 Kendaraan	14 kendaraan	-	-	-	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan			90%	92%	94%	96%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			90%	92%	94%	96%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82	83	84	85	87,24	89,99	90	91	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			81%	82%	83%	84%	85%	100%	100%	100%	

	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			1000 pelayanan	1.110 pelayanan	1.200 pelayanan	1.250 pelayanan	4.479 pelayanan	1.220 pelayanan	1.300 pelayanan	1.350 Pelayanan	
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			85%	86%	88%	89%	85%	100%	100%	100%	

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2023)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngoro

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Ngoro dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Ngoro dalam mendukung visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"*** pada misi ke tiga yaitu ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan"*** dapat terwujud dengan maksimal pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngoro antara lain :

1. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
2. Kurang meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan yang dilayani oleh kecamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan

program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kec. Ngoro**	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1 inovasi**	2.440.474.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Ngoro**	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1**	2.440.474.000	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**82,75**				**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,75**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**10.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**10.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
						Perangkat Daerah					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**91,50 %**	**2.190.474.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**91,50%**	**2.443.772.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	2.190.474.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	2.190.474.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**IP ASN Perangkat Daerah**	**81**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**IP ASN Perangkat Daerah**	**81**	**0**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Stel	0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**	**96%**	**53.532.400**	**Administrasi Umum**		**Persentase Penyediaan Administrasi**	**96%**	**53.532.400**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan			**Perangkat Daerah**		**Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.215.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.215.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	8.872.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	8.872.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.245.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.245.200	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	16.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	16.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**0%**					**0%**	
	Pengadaan Mebel		**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0 paket**	**0**	**Pengadaan Mebel**		**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0 paket**	**0**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan**	**100%**	**110.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan**	**100%**	**120.400.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**96%**	**76.067.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**96%**	**76.067.600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.228.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.228.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan	3 unit	17.839.600	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor	3 unit	17.839.600	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		berfungsi dengan baik			dan Bangunan Lainnya		yang terpelihara dan berfungsi dengan baik			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Kec. Ngoro**	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**16.730.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Ngoro**	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**16.730.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**1.350 Pelayanan**	**16.730.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**1.350 Pelayanan**	**16.730.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	16.730.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	16.730.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec. Ngoro**	**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**100%**	**183.270.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Ngoro**	**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**100%**	**183.270.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat**	23 Fasilitasi	**183.270.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat**	23 Fasilitasi	**183.270.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	27.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	27.500.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5 Dokumen	27.499.880	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5 Dokumen	27.499.880	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Dokumen	34.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Dokumen	34.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	5 Dokumen	93.770.120	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	5 Dokumen	93.770.120	
					2.640.474.000					**2.640.474.000**	

RENCANA SUB KEGIATAN KECAMATAN NGORO TAHUN 2025

No	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN SESUAI PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI
	7.01	**KECAMATAN**	**IKM Kecamatan**	**95,60**	**2.640.474.000,00**		**Kecamatan Ngoro**
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,75**	**2.440.474.000**		**Kecamatan Ngoro**
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**1 Inovasi**			**Kecamatan Ngoro**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**10.000.000,00**		**Kecamatan Ngoro**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Penyusunan Dokumen Ranwal Renja 2026	*Jumlah Penyusunan Dokumen Ranwal Renja 2026*	1 Dokumen			
		Penyusunan Dokumen Rankhir Renja 2026	*Jumlah Penyusunan Dokumen Renja 2026*	1 Dokumen			
		Penyusunan Renja 2026	*Jumlah Penyusunan Dokumen Renja 2026*	1 Dokumen			

		Penyusunan Dokumen Renja Perubahan2025	*Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2025*	1 Dokumen			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan	*Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan*	4 Laporan			
		Penyusunan Dokumen LKjIP	*Jumlah Laporan LKjIP*	1 Laporan			
		Penyusunan Dokumen LRA	*Jumlah Laporan LRA*	12 Laporan			
		Penyusunan Dokumen CALK	*Jumlah Laporan CALK*	1 Laporan			
		Penyusunan Dokumen SAKIP	*Jumlah Laporan SAKIP*	1 Laporan			
		Penyusunan Dokumen LKPJ	*Jumlah laporan LKPJ*	1 Laporan			
		Sinergitas Kecamatan	*Jumlah Laporan Sinergitas Kecamatan*	1 Laporan			
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah**	**91,50%**	**2.190.474.000,00**		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	**2.190.474.000,00**	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Penyediaan Gaji ASN		15 Orang/Bulan	1.172.438.000,00		
		Penyediaan Tunjangan ASN		15 Orang/Bulan	954.460.000,00		
		Honor Pengelola Keuangan		6 Orang/Bulan	63.576.000,00		

	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IP ASN Perangkat Daerah**	**82**	**-**		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket (1 paket terdiri dari 22 stel pakaian)	-	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Batik Identitas Ngoro	*Jumlah Pengadaan Kain Batik Identitas Ngoro*	1 Paket (1 paket terdiri dari 22 stel pakaian)			
		Kheki	*Jumlah Pengadaan Kain Kheki*	1 Paket (1 paket terdiri dari 22 stel pakaian)			
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	-	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Bimtek Peningkatan ASN	*15 Orang*				
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan**	**96%**	**53.532.400,00**		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					

		Pengadaan Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya	*1 Paket Pengadaan Komponen Listrik*	1 Paket			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.215.200,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Apar	5 Paket				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Makanan dan Minuman Rapat	*12 Paket Makanan dan Minuman*				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.872.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Fotocopy	Jumlah Paket belanja Fotocopy				
		Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas,Banner	*Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan*				

	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.245.200,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Koran (2),	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen			
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		ATK	1 Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor	*1 Paket*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.200.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
				12 Laporan			
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**100%**	**110.400.000,00**		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					

		Listrik dan Telp Kantor		12 Laporan			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Tenaga Administrasi Kantor (4 orang)	*12 Laporan*	12 Laporan			
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**96%**	**76.067.600,00**		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.228.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Pajak		2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			
		BBM		2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			
		Service Kendaraan Dinas		2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.000.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll		12 Unit			

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	17.839.600,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Pemeliharaan Gedung		1 Unit			
		Pemeliharaan Pendopo		1 Unit			
		Pemeliharaan Rumah Dinas		1 Unit			
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**16.730.000,00**		
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**1.350 pelayanan**	**16.730.000,00**		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	16.730.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)	*1 Laporan (Laporan E-Sukma)*	1 Laporan		1 Laporan	
		Pelayanan PATEN	*4 laporan Triwulanan*	4 Laporan		4 Laporan	
		Inovasi/FKP	*1 Laporan*	1 Laporan		1 Laporan	

	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti**	**100%**	**183.270.000,00**		
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat**	**23 Fasilitasi**	**183.270.000,00**		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	27.500.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Asistensi Penyusunan LPJ	*1 Dokumen Tahunan*				
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	*1 Dokumen Tahunan*				
		Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa	*1 Dokumen Tahunan*				
		Asistensi Penatausahaan Desa	*1 Dokumen Tahunan*				
		Asistensi Perubahan APBDes	*1 Dokumen Tahunan*				
		Asistensi Penyusunan APBDes	*1 Dokumen Tahunan*				
		Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	*1 Dokumen Tahunan*				

		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	*1 DokumenTahunan*				
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	27.499.880,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :				DAU	
		Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan	*2 Dokumen*				
		Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa	*1 Dokumen*				
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	*1 Dokumen*				
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa	*1 Dokumen*				
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	34.500.000,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Honorarium Tim Pelaksana Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*1 Dokumen*				
		Pembinaan Satlinmas	*1 Dokumen*				

		Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	*1 Dokumen*				
		Penertiban dan Penegakan Perda	*1 Dokumen*				
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	93.770.120,00	DAU	Kecamatan Ngoro
		Rincian :					
		Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat*	*1 Dokumen*			
		Pelaksanaan Hibah Sapi	*Jumlah Dokumen*	*1 Dokumen*			
		Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (LPM,PKK,Posyandu,Kartar,RT RW) ,	*Jumlah Dokumen*	*1 Dokumen*			
		Fasilitasi kegiatan tematik : KLA,Kab Sehat,Pengarus Utamaan Gender , Stunting, penanggulangan kemiskinan	*Jumlah Dokumen*	*1 Dokumen*			
		Fasilitasi Bantuan Sosial	*Jumlah Dokumen*	*1 Dokumen*			

Tabel 2.6 Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Ngoro Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing–masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 adalah sebagaimana tabel 2.6 (T-C. 32) berikut :

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025
Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Ngoro

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		NIHIL		

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2025)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngoro ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	83	84	85	86
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,30	75,60	76,00	76,50

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	83	84	85	86

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2025)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Ngoro yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2025. Renja Kecamatan Ngoro merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ngoro.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngoro Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Ngoro yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro untuk 5 Tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Ngoro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

Table 3.2 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**Unsur Kewilayahan**								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kec. Ngoro**	**82,75**				**83,20**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**		**100 %**	**10.000.000**			**85%**	**30.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	5.000.000			4 dokumen	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	5.000.000			21 Laporan	15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**		**91,50%**				**92%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang	2.190.474.000			15 Orang	4.235.186.411
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IP ASN Perangkat Daerah**		**82**	**0**			**82**	**45.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		O Stel	0			1 paket (20 stel)	35.000.000

	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 orang	0			17 Orang	55.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**		**96%**	**152.628.000**			**98%**	**290.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	5.000.000			1 paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	1.215.200			1 paket	150.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	10.000.000			12 paket	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	8.872.000			1 paket	35.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan		1 dokumen	2.245.200			2 dokumen	5.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket	10.000.000			1 paket	60.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	16.200.000			12 laporan	50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**0%**	**0**			**65%**	40.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 paket	0			1 paket	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan**		**100 %**	**110.400.000**			**100 %**	**120.000.000**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	50.400.000			12 laporan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lapoan	60.000.000			12 Lapoan	60.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**		**96%**	**76.067.600**			**94%**	**130.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	50.228.000			5 unit	60.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 unit	17.839.600			3 unit	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit	8.000.000			10 unit	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**Kec. Ngoro**	**100 %**	**16.730.000**			**100 %**	50.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**		**1.350 Pelayanan**	**16.730.000**			**1.400 Pelayanan**	**40.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1.350 pelayanan	16.730.000			1.400 pelayanan	40.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**Kec. Ngoro**	**100 %**	**183.270.000**			**100 %**	**420.000.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat**		**23 Fasilitasi**	**183.270.000**			**19 Fasilitasi**	**380.000.000**

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 dokumen	27.500.000			8 dokumen	80.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan pembangunan desa		5 dokumen	27.499.880			5 dokumen	80.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		5 dokumen	34.500.000			5 dokumen	90.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		5 dokumen	93.770.120			5 dokumen	170.000.000
	JUMLAH				**2.640.474.000**				**5.445.186.411**

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2024)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplist rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian

sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN NGORO

KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD : KECAMATAN NGORO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB	APBD PROV		USULAN APBN		
		OUTPUT	OUTCOME			(Rp)	SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB / DAK
7.01	**KECAMATAN**		**IKM Kecamatan**	**95,60**	**Kec. Ngoro**	**2.640.474.000,00**					
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,75**	**Kec. Ngoro**	**2.440.474.000**					
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1 Inovasi**	**Kec. Ngoro**						
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi		100%		**10.000.000,00**					

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		**5.000.000,00**					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan		**5.000.000,00**					
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		91,50 %		**2.190.474.000,00**					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/Bulan		**2.190.474.000,00**					
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	IP ASN Perangkat Daerah		81		**0**					
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang		**0**					
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		96%		**53.532.400,00**					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		**5.000.000**					
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		**1.215.200**					

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket		**10.000.000**					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket		**8.872.000**					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		**2.245.200**					
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket		**10.000.000**					
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		**16.200.000**					
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		**100%**		**110.400.000,00**					
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		**50.400.000**					
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		**60.000.000**					

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		**96%**		**76.067.600**					
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit		**50.228.000**					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit		**8.000.000**					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit		**17.839.600**					
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**		**16.730.000,00**					
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1.350 pelayanan		**16.730.000,00**					
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		19 Laporan		**16.730.000,00**					

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti**	**100%**		**183.270.000,00**					
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		23 Fasilitasi		**183.270.000,00**					
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen		**27.500.000**					
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen		**27.499.880**					
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen		**34.500.000**					

7.01.06.2.01.001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 Dokumen		**93.770.120**					

(Sumber : Data Kec. Ngoro Tahun 2024)

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD kecamatan Ngoro merupakan dokumen awal perencanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Ngoro untuk tahun 2025. Rancangan Awal ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang terangkum dalam kegiatan maupun sub kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngoro. Guna menunjang keberhasilan maka dalam penyusunan RENSTRA 2021 – 2026 melalui berbagai rapat koordinasi di kantor Kecamatan Ngoro antara Kasi, Kasubbag, Sekcam dan Camat dalam penentuan Indikator sehingga apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan benar dan baik. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan masih mengalami banyak hambatan karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya SDM yang handal, dan terbatasnya anggaran kecamatan sebagai OPD terutama belum stabilnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya pagu anggaran yang didapat Kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pengusulan kembali melalui PAK tahun yang berjalan.

5.2 Kaidah – kaidah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro mengacu pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD yang diberikan oleh Tim Anggaran Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Kecamatan Ngoro pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun adalah meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan Ngoro sendiri maupun degan pihak external. Untuk tetap mendukung terlaksanakan kegiatan pada tahun 2025 perlu adanya pengoptimalan dari Seksi maupun Sub Bidang yang membidangi karena semakin berkurangnya SDM yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan PPTK Kegiatan sehingga bisa menghasilkan realisasi kinerja dan realisasi anggaran seperti apa yang direncanakan. Serta untuk mencapai kinerja yang baik maka dilakukan pembinaan kepada pemerintah Desa dan koordinasi yang baik antar instansi di atas ataupun instansi jajaran samping sehingga tujuan Kecamatan Benar-benar akan terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Awal Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dan perkiraan maju 2026 yang telah di susun dalam dokumen Renstra. Isu-isu strategi yang di susun sudah memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, catatan penting serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Secara umum semua persiapan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngoro sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Ini namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan didalamnya yang akan dievaluasi untuk keberhasilan di tahun berikutnya sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal. Dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

CAMAT NGORO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KEC. NGORO

SATRIYO WAHYU UTOMO,S.IP,M.Si
Pembina
NIP. 19880618 200701 1 001